

**PENGARUH *BUDGET TRANSPARENCY* DAN *FISCAL AUTONOMY*
TERHADAP *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Oleh :

DITO MULDA SAFERI

2020/20043035

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *BUDGET TRANSPARENCY* DAN *FISCAL AUTONOMY*
TERHADAP *FINANCIAL SUSTAINABILITY* PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)

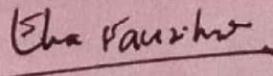
Nama : Dito Mulda Saferi
Nim/TM : 20043035/2020
Program Studi : S1 Akuntansi (NK)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Mei 2024

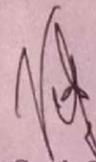
Disetujui Oleh :

Mengetahui
Kepala Departemen Akuntansi

Pembimbing



Dr. Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak
NIP: 19710522 20003 2 001



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP: 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy*
terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia
Tahun 2020-2022)

Nama : Dito Mulda Saferi

Nim/TM : 20043035/2020

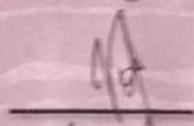
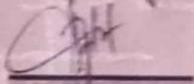
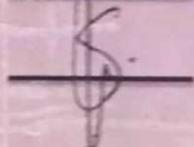
Program Studi : S1 Akuntansi (NK)

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Padang, Mei 2024

Tim Penguji :

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	2. 
3	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dito Mulda Saferi
NIM/Tahun masuk : 20043035/2020
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/9 Februari 2002
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl Bandes Kampung baru balai baru RT02 RW01
No Hp : 089519167100
Judul Skripsi : Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Mei 2024
Yang menyatakan,



Dito Mulda Saferi
NIM. 20043035

ABSTRAK

Dito Mulda Saferi. (20043035/2020). Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022).

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *budget transparency* dan *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022. Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari website resmi pemerintah daerah dan website e-ppid BPK RI dan data TPAD yang dilihat pada website resmi pemerintah daerah. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang dihitung dengan rumus slovin. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *budget transparency* tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability* dan *fiscal autonomy* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*.

Kata Kunci : *Budget Transparency, Fiscal Autonomy, Financial Sustainability*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof Parengki Susanto, SE, M.Sc Ph,D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
2. Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si.Ak selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
3. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi penulis yang mana telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.

4. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta menguji skripsi penulis
5. Bapak Dr Erinos Nr, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama melaksanakan studi.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Teristimewa kepada, Syafrida (Ibu) dan Alm Mulyadi (Ayah), untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini. Selalu ada doa beliau di setiap langkah penulis berjuang dalam menggapai impian. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan selalu penulis persembahkan untuk beliau.
8. Untuk saudara penulis, kakak : Yenike Mulda Febrisya Serta Mando Kevin, Teti Mulda Oktiwi, Wahyu Mulda Aqasyar, adik : Aisyah Mulda Septinandita, Nana Maida Valery yang selalu mengerti akan keadaan dan impian yang penulis inginkan. Terima kasih telah terus mendukung penulis. Pencapaian ini penulis persembahkan untuk kalian.
9. Untuk Fadhillah Raudhatul Jannah terima kasih telah memberikan warna baru di kehidupan penulis. Terima kasih atas satu kalimat penting yang

merubah keadaan penulis. Semoga kedepannya kita dapat terus bertumbuh dan yang terpenting apapun yang dijalani kedepannya harus bahagia.

10. Keluarga besar Asma, terima kasih telah mendukung penulis selama ini

11. Teman- teman Akuntansi kelas B terima kasih atas kebersamaanya dalam memperjuangkan gelar ini dengan semua momen berkesan yang kita jalani. Sungguh pertemuan luar biasa yang sangat menyenangkan yang dipaksa harus berakhir. Layaknya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal, maka ingatlah ini bukan akhir dari segala perjuangan. Namun awal untuk kita menghadapi dunia yang tak mudah diprediksi layaknya harga saham. *Keep learning, keep growing, and see you on top* .

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Penulis,

Dito Mulda Saferi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	13
C. Manfaat Penelitian	13
D. Rumusan Masalah	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Pengembangan Hipotesis	29
D. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Operasional Variabel	35
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis Data	38
1. Statistik Deskriptif	38
2. Uji Asumsi Klasik	39
3. Analisis Regresi Linear Berganda	41
4. Uji Hipotesis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Deskripsi Data Variabel Penelitian	44
1. <i>Financial sustainability</i> (FS).....	44
2. <i>Budget Transparency</i> (BT)	45
3. <i>Fiscal Autonomy</i> (FA).....	46
C. Hasil Analisis Data	46
1. Hasil Analisis Deskriptif.....	46
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	48
3. Hasil Uji Hipotesis	52
4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
D. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Keterbatasan Penelitian	62
C. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif.....	47
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas.....	48
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas setelah transformasi dalam bentuk logaritma natural	49
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	53
Tabel 8 Hasil Uji F	53
Tabel 9 Hasil Uji t.....	54
Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rerangka Konseptual	32
Gambar 2 Indikator Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 data sampel kabupaten/kota	72
Lampiran 2 data financial sustainability.....	73
Lampiran 3 Data Budget Transparency.....	77
Lampiran 4 Data Fiscal Autonomy.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis keuangan dunia pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang besar pada pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi serta memperhatikan keseimbangan anggaran (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022). Krisis keuangan dapat menyebabkan biaya ekonomi yang parah berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan output, kebangkrutan perusahaan, ketidakstabilan sektor keuangan, dan penurunan penyaluran kredit. Dampak negatif dari krisis global terlihat dari menciutnya pembiayaan kegiatan investasi, melambatnya penyerapan tenaga kerja, serta rendahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut melemahkan kapasitas pemerintah agar dapat terus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penurunan keuangan publik akibat krisis tersebut dapat menyebabkan kondisi krisis keuangan di berbagai tingkat pemerintahan (Pina et al., 2020).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada keberlanjutan keuangan layanan publik. Oleh karena itu, analisis keberlanjutan keuangan di setiap tingkat pemerintahan diperlukan untuk membuat kebijakan yang tepat untuk

mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk kesejahteraan generasi yang akan datang (Subires et al., 2019).

Sejak otonomi daerah berlaku, pengelolaan daerah telah dialihkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang memegang kendali sebelumnya. Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakatnya dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama sebagai daerah otonom. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah agar dapat memberikan layanan publik yang berkelanjutan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mencapai keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*). Keberlanjutan keuangan merupakan kemampuan pemenuhan kewajiban pemberian layanan publik baik secara kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang (Rodríguez Bolívar, 2017).

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang krusial pada pemerintah daerah karena memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah akan meningkat jika

keuangan dikelola dengan baik. Pemerintah daerah akan terus berupaya memperkuat kondisi keuangan dengan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas agar dapat memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat pada setiap daerah (Andrews, 2015). Kondisi keuangan daerah yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan beban pada masyarakat di masa depan merupakan tanda dari kondisi keuangan yang baik. Kondisi tersebut merupakan pertimbangan penting dalam menilai keberlanjutan keuangan pemerintah untuk kelangsungan keuangan di masa depan agar dapat terus memberikan layanan publik (Rodriguez bolivar 2014).

Kondisi keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) bertujuan untuk menjaga layanan publik pada tingkat kualitas dan kuantitas yang sama untuk generasi mendatang (Rodríguez Bolívar, 2017). *Financial sustainability* menjadi tujuan jangka panjang yang harus dicapai oleh pemerintah daerah yang dapat dicapai dengan memperoleh surplus operasional untuk membiayai utang dalam rangka memberikan layanan publik (Slembeck et al., 2014). Surplus pada laporan operasional dapat mengindikasikan stabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Surplus pada laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas pemerintah daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemberian layanan publik kepada masyarakat. Karena pendekatan berbasis akrual pada laporan operasional memperhitungkan pengeluaran yang ada secara aktual, proyeksi pengeluaran atau biaya pada masa

depan, dan pemanfaatan investasi modal, pendekatan ini secara efektif menunjukkan kemampuan daerah untuk mempertahankan keberlanjutan keuangan di masa depan (Rodríguez Bolívar et al., 2016).

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan kondisi *financial sustainability* yang dapat digambarkan dari surplus operasional adalah pemerintah daerah kota Balikpapan yang mengalami surplus operasional selama tiga tahun berturut-turut dari tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022. Berdasarkan data LKPD Balikpapan, Pada tahun 2020 kota Balikpapan mengalami surplus operasional sebesar Rp 307.511.219.202,72 kemudian pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami surplus operasional sebesar Rp 103.528.740.096,26 dan Rp 962.835.065.642,01. Kondisi tersebut juga diiringi dengan kemampuan pelayanan publik yang baik. Ombudsman RI (2021) menyatakan bahwa kota Balikpapan memperoleh nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 99,25 yang termasuk dalam zona hijau dengan dengan kategori pelayanan publik tertinggi. Kemudian pada tahun 2022 nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kota Balikpapan sebesar 87,12 yang termasuk dalam zona hijau dengan kategori B dengan kategori pelayanan publik tinggi. Dari informasi tersebut memberikan indikasi bahwa surplus operasional juga akan diiringi dengan kemampuan pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan *agency theory*, teori ini berasumsi bahwa pengelola pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan sendiri sehingga tidak

memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan menuntut untuk mengetahui lebih banyak informasi untuk mengawasi seberapa baik kinerja dari pemerintah daerah dan seberapa baik kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di masa depan (Rodríguez Bolívar et al., 2016). Oleh karena itu, dengan mengatasi asimetri informasi dapat mendorong tercapainya *financial sustainability* pada pemerintah daerah.

Menurut IFAC (2012) pemerintah daerah yang dapat mempertahankan atau meningkatkan volume dan pelayanan publik merupakan pemerintah daerah yang memiliki kemampuan *financial sustainability*. Pemerintah daerah perlu mengetahui faktor penting yang memengaruhi *financial sustainability* agar dapat membuat kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan publik secara berkelanjutan. Menurut Gardini & Grossi (2018) *Financial sustainability* merupakan kondisi kebalikan dari *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mengetahui faktor penentu pada *financial sustainability* sangat berkaitan dengan faktor apa saja yang memengaruhi *financial distress*. Oleh karena itu, faktor penentu pada *financial distress* juga dapat menjadi solusi untuk *financial sustainability* (Rodríguez Bolívar, 2017). Faktor yang dapat memengaruhi *financial sustainability* yaitu berasal dari eksternal dan internal Wällstedt et al (2014). Faktor eksternal terkait dengan aspek sosial demografi dan ekonomi sedangkan faktor internal terkait dengan faktor manajerial dan politik (Gardini & Grossi, 2018).

Penelitian mengenai *financial sustainability* telah dilakukan oleh para peneliti dan akademisi dengan menggunakan faktor yang berbeda. Slembeck et al (2014) melakukan penelitian kualitatif tentang faktor yang berpengaruh terhadap terciptanya kondisi *financial sustainability* dari aspek ekonomi dan politik yaitu kebijakan yang berkaitan dengan transparansi, independensi dan hukum. Brusca et al (2015) meneliti variabel yang berpengaruh terhadap *financial sustainability* dengan menggunakan faktor ukuran daerah, sosial ekonomi, politik, dan struktur keuangan. Rodríguez Bolívar et al (2016) melakukan penelitian tentang faktor risiko dan pendukung *financial sustainability* dari faktor demografi, ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian yang dilakukan Navarro-Galera et al (2016) menguji *financial sustainability* pada pemerintah daerah dari dimensi layanan, pendapatan, dan hutang.

Penelitian tentang variabel-variabel yang terkait dengan aspek pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah penting dilakukan agar dapat mengetahui apakah praktik pengelolaan keuangan yang pemerintah daerah lakukan berpengaruh terhadap kemampuan pemberian layanan berkelanjutan. Selain itu, faktor yang bersifat internal seperti faktor manajerial daerah lebih mudah diatur atau dikendalikan dibandingkan faktor eksternal (Wällstedt et al., 2014). Faktor manajerial merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap *financial sustainability* (Gardini & Grossi, 2018). Faktor manajerial harus dijadikan perhatian utama oleh pemerintah daerah karena terkait dengan pengelolaan keuangan dan perumusan kebijakan yang dibuat untuk membatasi

tindakan kecurangan dan tindakan yang dilakukan agar dapat meningkatkan budaya organisasi manajemen, tata kelola yang efektif, dan rancangan fiskal dalam upaya mencapai *financial sustainability* (wardhani, 2022). Oleh karena itu, *budget transparency* dan *fiscal autonomy* merupakan faktor internal dalam pemerintahan dari sisi faktor manajerial yang harus menjadi perhatian besar oleh pemerintah daerah, sehingga penulis tertarik untuk menjadikan transparansi anggaran dan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel penentu terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

Budget transparency menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai *financial sustainability*. Untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, sangat penting untuk mengawasi kondisi keuangan daerah dengan mengawasi sumber dana dan pembiayaan yang digunakan (Bisogno et al., 2019). Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui upaya transparansi anggaran (*budget transparency*). Menurut (Alcaraz-Quiles et al., 2014) keterbukaan informasi kepada publik sangat erat kaitannya dengan upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menunjukkan keterbukaan informasi bahwa sumber daya yang digunakan telah digunakan secara maksimal dan sesuai kepentingan masyarakat melalui *budget transparency* (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno, 2022). Dengan Transparansi informasi publik dapat meningkatkan upaya pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat kebijakan berkelanjutan (Arbatli & Escolano, 2015). Menurut Bastida & Benito (2009)

semakin tinggi tingkat *budget transparency* akan mengurangi kondisi yang memungkinkan pejabat daerah menggunakan defisit fiskal untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga akan memperkuat kualitas pengelolaan keuangan. Dengan peningkatan pengelolaan keuangan tersebut akan memperkuat kondisi keuangan sehingga pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk memberikan pelayanan publik secara berkelanjutan (Andrews, 2015).

Faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mencapai *financial sustainability* dalam praktik desentralisasi yaitu *fiscal autonomy*. *Fiscal autonomy* yang ditunjukkan dengan kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan biaya sendiri (Koromath, 2016). Kondisi keuangan daerah akan stabil jika pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya dan mencari pendanaan sendiri. Kondisi tersebut ditunjang dengan hak yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan segala sumber pendanaan potensial yang dapat menjadikan daerah otonom mandiri dan berkelanjutan (Maizunati et al., 2020). Menurut Subires et al (2019) jika pendapatan daerah yang berasal dari sumber eksternal melebihi dari pendapatan yang didapatkan sendiri atau internal mungkin akan berisiko menghambat *financial sustainability*, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi kemandirian keuangan daerah agar dapat menjadi variabel pendorong untuk mencapai *financial sustainability*. Hasil Penelitian

terbaru yang dilakukan Santis (2020) menyatakan bahwa *fiscal autonomy* berpengaruh negatif terhadap *financial sustainability*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi & Sugiharti (2022) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*. Dengan adanya penemuan baru yang menunjukkan hasil yang berbeda tersebut, perlu dilakukan kembali penelitian lebih lanjut tentang pengaruh *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability*.

Penelitian tentang *financial sustainability* umumnya dilakukan pada sektor perbankan dan bisnis. Pada sektor publik masih relatif sedikit yang meneliti topik *financial sustainability* khususnya pada pemerintah daerah. Penelitian terkait *financial sustainability* pemerintah daerah umumnya dilakukan di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Penelitian yang menguji kondisi atau kesehatan keuangan sudah banyak dilakukan, namun yang secara khusus membahas *financial sustainability* masih sangat terbatas (Rodríguez Bolívar, 2017). Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti *financial sustainability* pada pemerintah daerah di Indonesia .

Di Indonesia, penelitian mengenai *financial sustainability* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Wardhani & Payamta (2020) melakukan penelitian dengan menguji faktor determinan *financial sustainability* pada sektor pemerintah daerah kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh Aryasi et al (2022) menguji pengaruh faktor kemandirian,

efisiensi, dan kinerja keuangan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Lhutfi & Sugiharti (2022) melakukan penelitian dengan judul “*Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia*” yang diuji pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Dari beberapa literatur yang didapatkan tersebut, belum ditemukan yang meneliti *financial sustainability* dengan menggunakan populasi seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Menurut Barbera et al (2017) pengelolaan keuangan setiap daerah berbeda-beda karena aturan administrasi dari pemerintah pusat, sifat atau karakteristik daerah, dan besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang *financial sustainability* dengan populasi seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh pulau dengan karakteristik daerah dan tingkat pengelolaan pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022) yang menguji apakah *budget transparency* memiliki pengaruh pada *financial sustainability* pada pemerintah di 110 negara dalam kurun waktu 2006-2019. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, *budget transparency* berpengaruh positif terhadap *financial sustainability* yang diukur menggunakan indikator keseimbangan fiskal, utang, pendapatan, dan pertumbuhan. *Budget*

transparency diukur menggunakan *Open Budget Index* (OBI) pada 92 pertanyaan yang menilai kelengkapan dan ketepatan waktu informasi anggaran pada 8 dokumen anggaran yang harus disediakan pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi anggaran bisa menjadi strategi untuk menginformasikan sumber daya yang digunakan yang disediakan oleh masyarakat melalui pembayaran pajak, retribusi, iuran sosial, dan lain-lain. Hal tersebut melegitimasi pemerintah agar meningkatkan kondisi tekanan fiskal bahwa sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022). Perbedaan Pertama, penelitian ini menambahkan variabel *fiscal autonomy* untuk menguji pengaruhnya terhadap *financial sustainability*. Kedua, *financial sustainability* pada penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan Rodríguez Bolívar et al (2016) yaitu menggunakan laporan operasional disesuaikan dengan menghilangkan pos luar biasa. Laporan operasional dapat menginformasikan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan publik. Karena pendekatan berbasis akrual pada laporan operasional memperhitungkan pengeluaran yang ada secara aktual, proyeksi pengeluaran atau biaya pada masa depan, dan pemanfaatan investasi modal, pendekatan ini secara efektif menunjukkan kemampuan daerah untuk mempertahankan keberlanjutan keuangan di masa depan (Rodríguez Bolívar et al., 2016). Sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah di Indonesia wajib untuk menyajikan laporan operasional berbasis akrual. Sesuai peraturan tersebut, laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, indikator yang digunakan Rodríguez Bolívar et al (2016) cocok digunakan pada konteks Indonesia.

Ketiga, variabel *budget transparency* pada penelitian ini diukur dengan 12 indikator yang tertera dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015. *Budget transparency* di Indonesia diwajibkan dengan amanat dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015 yang mengharuskan pemerintah daerah mempublikasikan 12 dokumen transparansi anggaran pada website pemerintah daerah. Oleh karena itu, pada konteks Indonesia, pengukuran untuk *budget transparency* lebih cocok menggunakan 12 dokumen transparansi anggaran sesuai Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015 dibandingkan 8 dokumen yang diukur pada *open budget index*. Keempat, tempat dan waktu penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia dengan periode waktu penelitian tahun 2020-2022.

Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penting untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur terkait penelitian *financial sustainability* pada pemerintah daerah yang masih relatif sedikit diteliti. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Budget Transparency* dan *Fiscal Autonomy* terhadap *Financial Sustainability* Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)”**.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh *budget transparency* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai *financial sustainability* pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait *financial sustainability*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *budget transparency* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh *fiscal autonomy* terhadap *financial sustainability* pemerintah daerah ?